



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISTEK, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	:	2022 – 2023
Masa Persidangan ke-	:	II (Dua)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat (Fisik dan Virtual)
Dengan	:	Kepala Perpusnas RI
Hari/Tanggal	:	Kamis, 24 November 2022
Pukul	:	10.00 – Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	:	Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI.
Acara	:	1. Evaluasi Program Kerja Tahun 2022 2. Membahas Perkembangan Isu-isu Terkini (Kebijakan Penentuan Indeks Literasi Berdasarkan Perpusnas RI dan UNESCO).
Hadir Komisi X DPR RI	:	32 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	:	Muhammad Syarif Bando (Kepala Perpusnas RI) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.25 WIB oleh **Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI /Ketua Komisi X DPR RI** setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

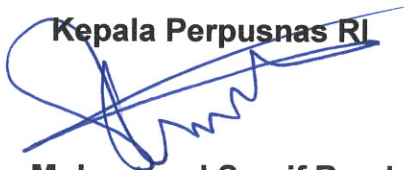
Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Kepala Perpusnas RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi berbagai penghargaan yang telah diterima Perpustakaan RI atas capaian kinerja Tahun Anggaran 2021 dan mendorong Perpustakaan RI untuk membuat langkah strategis percepatan peningkatan daya serap (per 21 November 2022) sebesar Rp 579.749.892.632 (87,8%) dari pagu Rp 660.304.500.000 sampai dengan Desember 2022 (bahan paparan halaman 22 sampai dengan 38).
2. Terkait Indeks Literasi Berdasarkan Perpustakaan RI dan UNESCO, maka Komisi X DPR RI memberikan catatan sebagai berikut:
 - a. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI agar unsur-unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) lebih dipertajam dan terukur sebagai variabel kajian membuat indeks literasi nasional, dan diarahkan untuk menjadi landasan kebijakan literasi oleh Pemerintah.
 - b. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI secara aktif berkoordinasi dengan Kemendikbudristek RI dan Bappenas RI agar indeks literasi Perpustakaan RI menjadi menjadi alat ukur atau standar literasi secara nasional sekaligus pembandingan hasil UNESCO.
 - c. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI membuat skema sosialisasi dan pendampingan ke Pemda, sehingga indeks literasi Perpustakaan RI dapat dilaksanakan oleh Pusat dan Daerah sebagai suatu kebijakan.
 - d. Komisi X DPR RI dan Perpustakaan RI sepakat perlunya penguatan kelembagaan untuk mengelola program dan kegiatan literasi sehingga menjadi suatu gerakan literasi secara nasional.
 - e. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI agar membuat terobosan terkait program dan kegiatan prioritas Perpustakaan RI agar mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah.
 - f. Komisi X DPR RI akan mengadakan Raker/RDP dengan Bappenas RI, Kemenkeu RI, Kemendikbudristek RI dan Perpustakaan RI, dalam rangka peningkatan literasi nasional.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.40 WIB

Kepala Perpustakaan RI

Muhammad Syarif Bando

Ketua

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM